

## **Kajian Pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Grobogan**

**Khusnul Khotimah Kumala Sari**

*<sup>1</sup> Program Studi Arsitektur, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*

*Email: Khusnulsari12@gmail.com*

---

### **Abstrak**

Berkembangnya pola kehidupan saat ini, membuat masyarakat untuk terus berkembang, mulai dari segi sosial, teknologi mupun juga dari segi ekonomi. Hal ini membuat rasa tertekan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi. Healing Environment pada umumnya ditujukan untuk bangunan fasilitas kesehatan yang mendeskripsikan pengaturan fisik dan organisasi budaya yang mendukung pasien dan keluarga dalam melewati tekanan yang dikarenakan oleh penyakit, kunjungan medis, proses penyembuhan, dan lainnya. Tempat yang tepat untuk merawat pasien dengan gangguan mental adalah rumah sakit jiwa ataupun tempat rehabilitasi yang sesuai. Rumah sakit jiwa sangatlah bervariasi dalam tujuan dan metodenya. Apa saja prinsip-prinsip healing environment dan bagaimana penerapannya pada bangunan rehabilitasi mental. Metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan beberapa sumber kemudian di deskripsikan melalui tulisan dan gambar. Berdasarkan hasil dari analisis prinsip-prinsip healing environment, terdapat beberapa hal yang dapat diambil dan dijadikan sebagai kesimpulan. Pada bangunan rehabilitasi mental prima harapan yang berlokasi di Bandung telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip dari healing environment.

**Kata Kunci:** Prinsip-prinsip; Healing Environment; Rehabilitasi Mental

**Article history:** *Received* 2022-09-07; *Revised* 2022-10-21; *Accepted* 2022-11-23;

---

### **PENDAHULUAN**

Pada era otonomi daerah, pembangunan ekonomi menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam daerah maupun faktor eksternal, seperti masalah kesenjangan dan isu global. Isu global ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalan. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah (Bappenas, 2006). Pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada pembangunan perkotaan menyebabkan munculnya kawasan-kawasan tertinggal yang diakibatkan oleh tidak meratanya pembangunan. Padahal sekitar 45 persen dari total penduduk Indonesia (220 Juta jiwa) yaitu sebanyak 99 juta jiwa bermukim di kawasan yang relatif kurang berkembang, yang

mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas.

Pembangunan kawasan tertinggal merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan kawasan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kawasan tertinggal seharusnya mengacu kepada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera serta berkeadilan. sehat, cerdas, ceria, bertqwa dan terlindungi. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat dominan menjadikan kehidupan kerukunan antar umat beragama yang sangat kondusif yang diaktualisasikan dalam perilaku hidup sehari-hari secara harmonisasi dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat.

Keteringgalan tingkat kemajuan wilayah pedesaan. Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat diperdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia. Khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan perkotaan. Dari kondisi yang sudah ada menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu :”Bagaimana meningkatkan efektifitas penanganan kawasan tertinggal di Kabupaten Grobogan?” Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan untuk lebih meningkatkan penanganan untuk mengatasipermasalahan permasalahan yang selama ini dihadapi. Tujuan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat. Serta untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerahdalam perspektif Ekonomi Islam.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah pembangunan yang merupakan terjemahan dari kata *development* baru kita kenal setelah perang dunia ke dua (Soedjono Hoemardani: 1981:1 dalam Agus Hadiawan: 2006:4). Dalam pengertian pembangunan terkandung arti adanya suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaiki, mengganti yang tidak atau kurang baik dengan yang baik. Dalam perngertian pembangunan tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan (agus Hadiawan: 2006:4). Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan

menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar yaitu :

- a. Perekonomian masyarakat, Yang diukur dengan indikator prosentase penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan.
- b. Sumberdaya manusia yang diukur dengan variabel ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan yang diukur dengan indikator prosentase penduduk menganggur, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah,
- c. Ketersediaan infrastruktur, yang diukur dengan variabel keberadaan jalan, prosentase rumah tangga pengguna listrik, prosentase rumah tangga pengguna telepon, air bersih, dan jumlah bank
- d. Aksesibilitas, yang diukur dengan variabel rata-rata jarak pusat desa ke ibu kota kabupaten,
- e. Kemampuan keuangan daerah, yang diukur dengan variabel celah kapasitas fiskal daerah, dan
- f. Karakteristik daerah, yang diukur dengan variabel prosentase bencana alam dan konflik sosial-politik

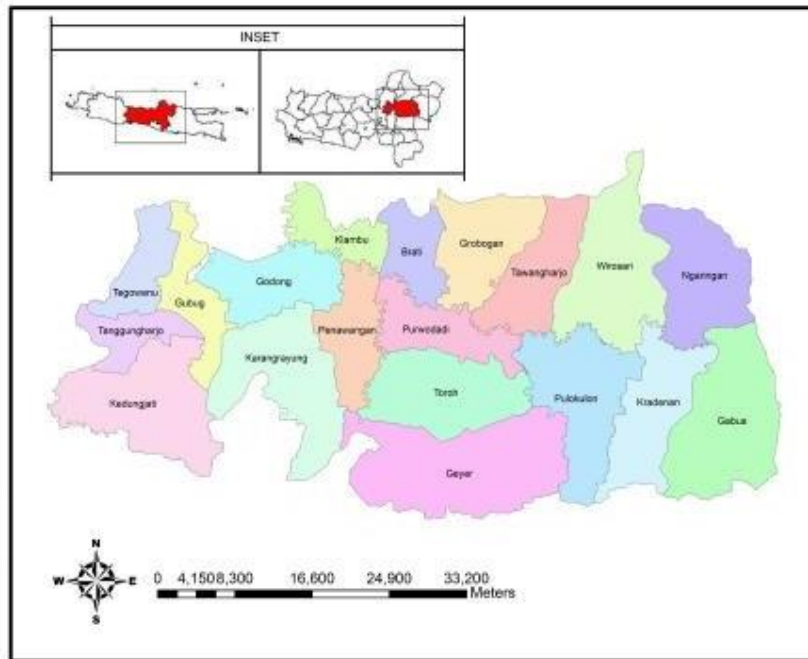
### **METODE PENELITIAN**

Jenis dan Sifat Penelitian Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukkan data-data berupa angka tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan memperkuat argumentasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk interpretasi, gambaran, dan lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110o 15' BT – 111o 25' BT dan 7o LS - 7o 30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blora. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan, 1451 Dusun, 1753 RW, 9.017 RT. Jumlah Desa terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Godong yaitu 28 Desa, sedangkan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Brati, Klambu, dan Tanggunharjo yaitu sebanyak 9 Desa. Jumlah perangkat desa di Kabupaten Grobogan adalah sebanyak 3075 orang dengan Ibukota berada di Purwodadi.



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan  
Sumber: Bappeda Kab. Grobogan, 2014

### 1. Sarana Kesehatan

Kecamatan yang memiliki skor sarana kesehatan tertinggi adalah Kecamatan Kedungjati, Penawangan, Toroh, dan Purwodadi. Pengambilan skor didasarkan pada jumlah sarana kesehatan eksisting dan kebutuhan sarana kesehatan dimasa kini. Kecamatan yang memiliki skor tertinggi artinya sudah sarana kesehatan sudah menjangkau semua masyarakat.



**Gambar 1 Kondisi Sarana Kesehatan Di Kabupaten Grobogan**

*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

**2. Sarana Pendidikan**

Kekurangan jumlah sarana pendidikan masih cukup banyak, walaupun demikian masih ada beberapa kecamatan yang memiliki sarana pendidikan lebih dari kebutuhan, kecamatan yang memiliki sarana pendidikan yang lenih dari kebutuhan saat ini adalah Kecamatan Kedungjati, Geyer, Brati, Klambu, Gubug, Tegowanu dan Tanggungharjo. Dalam kondisi eksisting sebagian besar kondisi sarana pendidikan tersebut tidak layak untuk digunakan.



**Gambar 2 Kondisi Sarana Pendidikan**

*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

**3. Analisis Aksesibilitas**

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Grobogan berada di kondisi kurang baik, hanya ada 1 kecamatan yang berada di kondisi baik yaitu Kecamatan Purwodadi, sedangkan kecamatan yang berada di kondisi buruk adalah Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Klambu. Skor dari penjumlahan ketersediaan transportasi di Kabupaten Grobogan adalah 37 dengan artian buruk, karena jauh dari angkutan umum dan sehingga tidak bisa dijangkau.

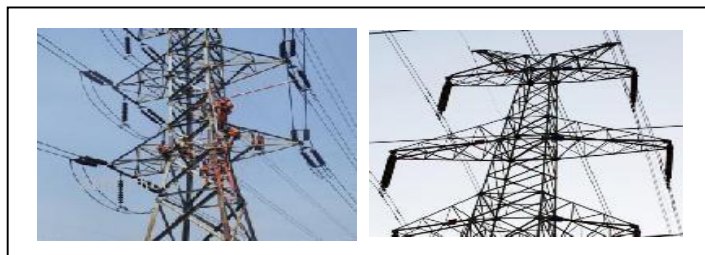


**Gambar 3 Kondisi Jalan Di Kabupaten Grobogan**

*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

#### **4. Listrik**

Jumlah pelanggan listrik dari tahun 2007-2018 mengalami kenaikan seiring bertambahnya kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Grobogan. Sampai tahun ini kebutuhan listrik di Kabupaten Grobogan sudah menjangkau ke seluruh pelosok desa. Ngaringan, Wirosari, tawangharjo, Grobogan dan Tegowanu. Itu artinya untuk tahun-tahun mendatang sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi dalam kebutuhan listrik pemerintah hanya perlu meningkatkan pelayanan listrik saja.



**Gambar 4 Kondisi Prasarana Listrik Di Kabupaten Grobogan**

*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

#### **5. Telepon**

Bahwa jumlah prasarana telepon umum dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan, sama halnya dengan penggunaan telepon rumah. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar masyarakat sudah menggunakan telepon genggam, jadi pemerintah tidak memfokuskan prasarana telepon umum atau telepon rumah lagi, akan halnya pemerintah akan memfokuskan kepada sarana prasarana yang lain. Masyarakat yang tinggal di desa tertinggal juga sudah dapat menjangkau komunikasi melalui telepon genggam.



**Gambar 5 Kondisi Prasarana Telepon Di Kabupaten Grobogan**

*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

#### **6. Air Bersih**

Kebutuhan air di Kabupaten Grobogan skor paling banyak yaitu Kecamatan Purwodadi, Brati dan Godong, karena 3 kecamatan tersebut memiliki jumlah pelanggan air terbanyak. Kebanyakan sebagian masyarakat di Kabupaten Grobogan masih memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan air mereka. Diharapkan pada tahun 2018 seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan sudah menggunakan air dr PDAM untuk kebutuhan mereka.



**Gambar 6 Kondisi Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Grobogan**  
*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

### **7. Sarana Peribadatan**

Jumlah sarana peribadatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan untuk sarana peribadatan seiring dengan bertambahnya penduduk yang ada di Kabupaten Grobogan. Tetapi untuk tahun 2008 dan 2009 jumlahnya sama dan tidak mengalami kenaikan yaitu sebanyak 7.745 buah dan hal ini terjadi juga pada tahun 2010 dan 2011 yang tidak mengalami kenaikan.



**Gambar 7 Kondisi Sarana Peribadatan Di Kabupaten Grobogan**  
*Sumber: Survey Peneliti, 2014*

### **SIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kawasan tertinggal yang ada di Kabupaten Grobogan dari 19 kecamatan maka yang termasuk kawasan tertinggal meliputi Kecamatan Penawangan, Brati, Pulokulon, Klambu dan Tanggunharjo sedangkan untuk kawasan tidak tertinggal adalah Kecamatan

Purwodadi, Godong dan Gubug, selain itu sisanya termasuk dalam katagori kawasan agak tertinggal. Jumlah kecamatan tertinggal ini sudah berkurang dari Tahun 2007 yang mencapai 6 kecamatan tertinggal dan 1 kecamatan sangat tertinggal. Pada Tahun 2012 pemerintah sudah berhasil meningkatkan 2 kecamatan yang termasuk dalam kecamatan tertinggal ke kecamatan agak tertinggal yaitu Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Tawangharjo, selain itu Kecamatan Klambu yang pada Tahun 2007 merupakan kecamatan sangat tertinggal kini di tahun ini sudah menjadi kawasan tertinggal.

Grobogan tergolong tanah labil jadi perbaikan jalan dilakukan tiap tahunnya. Selain itu jalan utama di Kabupaten Grobogan menjadi jalan primer yang menghubungkan antar kabupaten dan sering dilalui banyak kendaraan berat. Akan tetapi dari hasil analisis kebanyakan jalan yang ada di kecamatan-kecamatan juga sebagian besar masih berupa tanah (pada tahun 2007) tetapi saat ini sudah mulai diperkeras. Hasil trendline dari tahun 2007 sampai dengan tahun ini aksesibilitas, dan sarana prasarana sudah mulai ada peningkatan, walaupun perlu adanya pengoptimalan lagi dari pemerintah, untuk kesempatan kerja sendiri dari hasil trendline tahun 2007 sampai sekarang jumlah pencari kerja keluar daerah mulai terjadi penurunan hal ini disebabkan oleh banyaknya investor yang sudah membuka industri di Kabupaten Grobogan seiring dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan, industri-industri tersebut menyerap banyak sekali tenaga kerja dari dalam Kabupaten sendiri, sehingga Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan pekerjaan yang bekerjasama dengan industri yang ada, tetapi sebagian kecil lebih memilih mencari pekerjaan di luar Kabupaten bahkan diluar negeri. Namun demikian hal ini sudah cukup mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Grobogan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Bappenas, Direktorat Kewilayahan II. 2005. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan
- Kepmen Bappenas No. 50 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Kawasan Tertinggal
- Kepmen PDT No. 1 Tahun 2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal
- Wijaya, R. 2012. Angka Kemiskinan Ditargetkan 4,32 Juta Jiwa. Suara Merdeka.com, 29 Desember 2012. Diakses pada tanggal 2 Mei 2012.
- Wildani, Afi. 2013, Wawancara Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Grobogan. Grobogan
- Centre for Strategic and International Studies, 2000, Analisis CSIS: Otonomi Daerah – Penyelesaian atau Masalah.